

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02 TENTANG
JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA
SD,SMP,SMA DI DESA ILOMATA KECAMATAN
ATINGGOLA**

Oleh :

**MIZAN TOLOLIU
S2117118**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02 TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA SD, SMP, DAN SMA DI DESA ILOMATA KECAMATAN ATINGGOLA

Oleh :

MIZAN TOLOLIU

NIM :

S2117118

SKRIPSI

Skripsi ini Telah Memenuhi Syarat Yang Disetujui Oleh Pembimbing Pada
Tanggal... 27 Maret2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP, M.si
NIDN :0927128301

Darmawaty Abdul Razak S.IP, M.Ap
NIDN :0924076701

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichan Gorontalo



Darmawaty Abdul Razak S.IP, M.Ap
NIDN :0924076701

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02
TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM
HARI BAGI USIA SD, SMP, DAN SMA DI DESA
ILOMATA KECAMATAN ATINGGOLA**

Oleh :
MIZAN TOLOLIU
S2117118

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Di Setujui Oleh
Pembimbing Pada Tanggal...27...Maret 2022

Tim Penguji

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Arman S.Sos.,M.Si | (.....) |
| 2. Marten Nusi, S.IP.,M.AP | (.....) |
| 3. Sandi Prahara,ST.,M.Si | (.....) |
| 4. Dr. Fatma M. Ngabito S.IP., M.Si | (.....) |
| 5. Darmawaty Abdul Razak S.IP.,MAP | (.....) |

Mengetahui



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Pemerintahan

Dr. Arman S.Sos.,M.Si
NIDN : 09130788602



Ketua program studi Ilmu
Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak S.IP.,M.Ap
NIDN :0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, atau doctor) baik dari Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, Maret 2022

Saya yang membuat

Pernyataan



Mizan tololiu

Nim : S2117118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi’i)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”

(Aristoteles)

Persembahan

Sujud Syukur ku persembahkan kepada Allah SWT yang maha kuasa detak jantung, denyut nadi, nafas, dan putaran kehidupan yang di berikan sehingga saat ini saya dapat mempersembahkan karya tulis ini kupersembahkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Amir toliu, dan ibunda tasmin bukulu, ketulusannya dari hati atas segala Doa dan harapan yang tidak pernah sirna. Dan orang-orang terdekat yang sering memberi motivasi dan nasehat kepada penulis, serta Almamater Kebanggaanku

Universitas Ichsan Gorontalo.

ABSTRAK

MIZAN TOLOLIU. S2117118. IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA SD, SMP, SMA DI DESA ILOMATA KECAMATAN ATINGGOLA.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Desa No. 02 tentang jam wajib keluar pada malam hari bagi usia SD, SMP, SMA di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola, (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa yang mendorong dan penghambat Peraturan Desa No. 02 tentang jam wajib keluar pada malam hari bagi usia SD, SMP, SMA di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sudah cukup optimal, (2) Sumber daya dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sudah cukup baik. (3) Disposisi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sangat efektif. (4) Struktur birokrasi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan belum cukup optimal karena pemerintah Desa Ilomata Kecamatan Atinggola masih diperhadapkan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang paham dengan maksud dan tujuan dari kebijakan ini.

Kata kunci: implementasi, peraturan desa

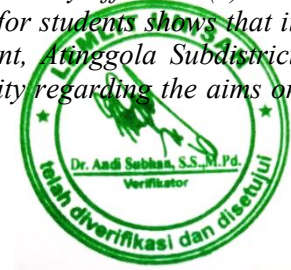


ABSTRACT

MIZAN TOLOLIU. S2117118. THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATION NUMBER 02 CONCERNING MANDATORY HOURS OUT AT NIGHT FOR ELEMENTARY, SECONDARY, AND HIGH SCHOOL AGES AT ILOMATA VILLAGE, ATINGGOLA SUBDISTRICT

This study aims to: (1) identify and describe the implementation of Village Regulation No. 02 concerning mandatory hours out at night for elementary, secondary, and high school ages at Ilomata Village, Atinggola Subdistrict, (2) find out and describe the factors supporting and inhibiting Village Regulation No. 02 concerning mandatory hours out at night for elementary, secondary, and high school ages at Ilomata Village, Atinggola Subdistrict. The research method used is a qualitative approach. Informants in this study amounted to 12 people. The results of the study show that: (1) Communication in the policy of limiting night out hours for students shows that it is optimal, (2) The resources in the policy of limiting night out for students show that it is good. (3) Disposition in the policy of restricting night out hours for students shows that it is very effective. (4) The bureaucratic structure in the policy of limiting night out hours for students shows that it is not optimal enough because the Ilomata Village government, Atinggola Subdistrict faces a problem with the level of understanding of the community regarding the aims or the objectives of this policy.

Keywords: implementation, village regulations



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena hanya izin dan kuasanya lah sehingga saya masih di berikan kesempatan, kekuatan, serta kemampuan dalam merampungkan hasil penelitian skripsi ini dengan baik. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa suatu ajaran keselamatan kepada manusia sampai akhir zaman, semoga rahmat dan hidayahnya tetap sampai kepada kita sebagai umat yang masih konsisten mengikuti ajarannya.

Dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, saya mengharapkan adanya koreksi atau saran yang positif dan membangun, sehingga penulisan ini dapat memberikan yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah pada akhirnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang dapat berjasa dalam hidup penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ayahanda Amir Tololiu dan Tasmin bukulu yang merupakan orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberi doa dan dukungan moril maupun nonmaterial secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga tidak lupa, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak Mohamad Ichan Gaffar S.E.M.AK sebagai ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ichan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si selaku Rektor Universitas Ichan Gorontalo. Bapak DR.

Arman S.Sos Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichan Gorontalo Bapak Marten Nusi, S.Ip, M.Ap selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan Universitas Ichan Gorontalo, Ibu Dr.Fatma M.Ngabito S.Ip M.Si selaku Pembimbing I, Pembimbing II Ibu Darmawaty Abdul Razak S.Ip, Map yang telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis serta bapak ibu staf dosen pengajar di lingkungan Ichan Gorontalo, Fakultas Sosial dan ilmu Politik , Program Studi Ilmu Pemerintahan. Teman-teman seangkatan yang masih bertahan sampai sekarang, para sahabat saya Ropal Palia, Roki pakaya, Abraham Djafar yang telah membrikan sumbangsih berupa dukungan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan skripsi ini. Semoga bantuan selama ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala

Wasalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Gorontalo,....,Maret 2022

Mizan Tololiu
Nim S2117118

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Kebijakan Publik	8
2.2 Tingkatan Kebijakan Publik	17
2.3 Pembentukan Peraturan Desa	20
2.4 Implementasi kebijakan publik	21
2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan	32
2.6 Definisi siswa	39
2.7 Kerangka Pikir Penelitian	40
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
3.1 Objek Penelitian	44
3.2 Metode Penelitian	44
3.2.1 Jenis Penelitian	44
3.2.2 Fokus Penelitian	44
3.2.3 Lokasi Penelitian	44
3.2.4 Informan Penelitian	45

3.2.5 Jenis dan Sumber Data	46
3.2.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.7 Analisis Data	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian	50
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	50
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	56
4.2.1 Faktor Internal	58
4.2.2 Faktor Eksternal	59
4.2.3 Faktor Komunikasi	61
4.2.4 Faktor Sumber Daya	63
4.2.5 Faktor Disposisi	66
4.2.6...Faktor Struktur Birokrasi	69
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
PEDOMAN WAWANCARA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	43
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif (Miles & Huberman, 2007).....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keadaan anak remaja di masa sekarang baik fisik, mental dan sosialnya bersifat spesifik dan di tandai dengan sifat yang lebih mementingkan diri sendiri, sampai-sampai di salahgunakan dengan sebaik-baiknya secara langsung maupun tidak secara langsung oleh orang yang ada di lingkungannya. Dengan karakter anak yang mudah terpengaruh dan di dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana atau orang-orang yang di lingkungannya yang berperilaku menyimpang. Bahkan di tambah lagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang cukup signifikan dan sangat mengambil peran dalam perkembangan anak mudah di setiap hubungan sehari-hari. Maka harus ada pengawasan terhadap anak-anak sekolah.

Produk kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mengatur, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kehidupan dalam bermasyarakat. Pemerintah harus hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tingkat pemerintah desa sampai dengan kepala negara atau presiden. Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10) dalam buku Kadji Yulianto (2015). Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: 1) Faktor Komunikasi (*Communication*). Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena

pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran; 2) Faktor Sumber Daya (*Resources*) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja; 3) Faktor Disposisi (*Dispositions*) Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut; 4) 4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara pemerintah desa mengeluarkan kebijakan Peraturan Desa No 02 Tahun 2020 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Anak Usia SD, SMP, SMA Se-Desa Ilomata. Peraturan desa yang di terbitkan diharapkan dapat menjadikan system pendidikan

yang lebih baik untuk memajukan motivasi belajar anak sekolah sehingga anak sekolah bisa menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas , dan di banggakan untuk membangun bangsa dan Negara. Pemerintah juga menginginkan anak sekolah bisa dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, dan meningkatkan potensi anak sekolah bisa menjadi orang-orang yang paham agama, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, sehat, berilmu, kreatif mandiri bisa bersaing dengan masyarakat yang bertanggung jawab.tujuannya adalah mempergunakan waktu luang dengan hal-hal bersifat positif. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan perkembangan jaman, pergaulan anak sekolah sudah melewati batas, kewajiban yang seharusnya menuntut lmu untuk masa depan malah malah mereka pergunakan dengan hal yang tidak ada pentingnya. Mereka menghabiskan waktu untuk nongkrong, minum-minuman beralkohol, trek-trekan motor bahkan lebu banya bermain game online dan hal yang tidak bermanfaat.

Permasalahan lain yang ditemukan di Desa Ilomata yakni banyaknya kenakalan remaja atau kenakalan pelajar telah menjadi perhatian khusus dari masyarakat, guru Pendidikan hingga pemerintah desa..Terkait dengan dikeluarkannya regulasi tersebut, salah seorang aparatur Desa Ilomata ketika diobservasi peneliti mengatakan bahwa tujuan pemerintah Desa menerbitkan aturan tersebut karena pemerintah sangat cinta dan peduli dengan daerahnya sehingga memperhatikan segala hal yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daerahnya.Salah satu yang menjadi sasaran dan atng di perhatikan pemerintah desa ilomata adalah dalam hal pendidikan. Seiring dengan pemerintah desa ilomata yang bergerak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan

pelajar di luar jam sekolah, dengan memberikan konsekuensi apabila terdapat perilaku yang menyimpang dan tidak baik dari pelajar. Selanjutnya ditengah pandemic Covid-19 semua satuan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara menerapkan Proses Pembelajaran Jarak Jauh yang berarti guru tidak bisa mengawasi langsung perkembangan belajar dari peserta didik. Peran dari orang tua siswa perlu untuk mengawasi langsung dari rumah. Akan tetapi jika dilakukan pembiaran oleh orang tua yang dikhawatirkan penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh baik itu Handphone Smartphone, Laptop, atau computer malah akan disalahgunakan oleh peserta didik dengan hanya bermain game dan menonton saja.

Peraturan Desa No 02 Tahun 2020 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Anak Usia SD, SMP, SMA Se-Desa Ilomata juga di harapkan dapat menjadi fasilitas agar terciptanya generasi muda yang berkualitas dan terselamatkan dari hal-hal yang negative. Di mana peraturan inipun sangat di laksanakan khususnya di desa ilomata. Dalam peraturan ini mengandung konsekuensi apabila terjaring anak-anak pelajar yang melakukan hal-hal menyimpang pada malam hari. Jam wajib keluar pada malam hari adalah batas waktu pelajar anak pada malam hari, yang bertujuan agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat di luar jam belajar. Pemberlakuan jam wajib keluar malam seperti terdapat pada pasal 3 tentang pelaksanaan aturan tersebut : 1.) Jam wajib keluar pada malam hari dilaksanakan setiap hari di mulai Pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 wita. 2.) jam wajib keluar malam sebagaimana di maksud pada ayat (1) di peruntukan bagi peserta didik dalam pengawasan

orang tua. 3.) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi anak usia SD,SMP,SLTA, yang mendapat izin dari orang tua dengan alasan melaksanakan perintah yang berhubungan dengan aktivitas keluarga. 4.) Pengecualian sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah pada pelaksanaan pesta pernikahan, beathan, Khitanan, Gunting Rambut, Resepsi, Duka, HBI, HBN, dan kegiatan lainnya di desa dapat di bijaksanani hingga pukul. 24.00 wita, bagi yang melaksanakan dan atau dilokasi anak tersebut.

Pemerintah Desa juga sangat mengharapkan kerja sama dari orang tua murid untuk mengawasi jalannya regulasi ini karena mereka adalah garda terdepan dalam membimbing anaknya. Di dalam peraturan desa nomor 02 tahun 2020 tentang jam wajib keluar padalam hari terhadap anak se-desa ilomata ini di sebutkan satuan tugas yang bertugas peraturan ialah, pemerintah desa kerja sama dengan orang tua ataupun masyarakat setempat. Yang di harapkan dapat membantu proses terlaksananya peraturna ini. Satuan tiugas yang di maksud bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam hari dapat berjalan dengan baik, yang memfasilitasi kebutuhan pelaksana kegiatan belajar pada malam hari.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan aktivitas penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Desa No 02 Tahun 2020 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Anak Usia SD, SMP, SMA Se-Desa Ilomata”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa No.02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mendorong Dan Penghambat Peraturan Desa No. 02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Desa No.02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola
2. Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Faktor Apa Yang Mendorong Dan Penghambat Peraturan Desa No. 02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata kecamatan Atinggola.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat di ambil oleh penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai referensi bagi para akademi untuk penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.

2. Secara praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah setempat yang menjalankan peraturan desa tentang jam wajib keluar malam hari bagi usia sd, smp, sma di dessa ilomata untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan menjalankan peraturan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya di bedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi pengancur, invasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keaban (2004:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa :”*publikpolicy* dapat di lihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja, sebagai konsep filosofi, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang di

inginkan, sebagai suatu produk, kebijakan di pandang sebagai serangkaian sekumpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan di pandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang di harapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kamus besar bahasa Indonesia kebijakan di jelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dan pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi sebagainya). Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim di gunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut di tuangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton dalam toha (1991:60), mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai kebijakan otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang di pilih pemerintah untuk di kerjakan atau tidak di kerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. Sementara itu, koontz dan O'Donnel (1972:113), mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut Anderson (1984:113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984:113), mengklasifikasi kebijakan, *policy*, menjadi dua : substantif dan procedural.

Kebijakan substantive yaitu apa yang harus di kerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan procedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut di selenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebaikan-kebaikan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabab-pejabat pemerintah.

Selanjutnya di katakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan di kerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik yang bentuknya yang positif di dasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat di capainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat di jabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang di pertegas oleh Budiman Rusli (2000:51-52) di mana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan harus di bedakan dari keputusan, paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni :
 - 1) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan

- 2) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - 3) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelurusan interaksi yang berlangsung di antara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak di kritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.
 3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan Negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketidadaan keputusan tersebut

meliputi juga keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan di capai, yang mungkin sudah dapat di antisipasikan sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang di harapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini di karenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak di harapkan (*unitended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
6. Kebijakan kebanyakan di definisikan dengan memasukan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakn sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah di tetapkan jauh dari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau di lupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu prose yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu yang sifatnya dinamis, bukan statis, artinya setelah

kebijakan tertentu di rumuskan, di adopsi, lalu di implementasikan akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya di tetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai actor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan Negara menyagkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sector publik dan sector swasta, di sini perlu di tegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusan di proses, atau setidaknya di sahkan atau diratisifasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut di sebut kebijakan Negara.
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang di maksud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, actor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan di pahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak atau perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin di capai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Sementara persons (2006:15) , memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* yang mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Selanjutnya Nurcholis (2007:263), memberikan definisi tentang kebijakan suatu keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat di jadikan pedoman perilaku dalam hal :

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus di lakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan,
2. Penerapan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang di maksudkan.

Makna kebijakan seperti yang di kutip oleh Jones (1996:47) dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah : “*a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*”.

Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap di cirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi

menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye (2008:1). Mengemukakan : “*publik policy is what ever governments choose to do or not to do*”. Konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak di lakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan Negara. Hal ini di sebabkan “sesuatu yang tidak di lakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang di lakukan oleh pemerintah”. Dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami : 1) Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; 2) Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan 3) Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak di laksanakan.

Kalau konsep ini diikuti, maka perhatian dengan demikian perhatian kita dalam mempelajari kebijakan seyogianya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dalam kaitan inilah maka sudah di pahami jika kebijakan acap kali di berikan makna sebagai tindakan politik. Sehubungan dengan hal tersebut Dunn, (2003:22),

mengatakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Itulah sebabnya Utomo (2006:76), mengemukakan setiap peraturan daerah undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh system politik, system pemerintahan atau suasana politik atau bahkan keinginan *power* elit pada suatu waktu. Sengada dengan hal tersebut (Nugroho, 2003:7), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberi sanksi di jatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dari pengertian tersebut kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama di pandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang apakah menjadi peraturan pemerintah, atau

peraturan presiden termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus di taati.

2.2 Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) peraturan pemerintah, (d) peraturan presiden, dan (e) peraturan daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau menjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur dan bupati dan walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat (*mikro*) adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang di keluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, Nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau

yang sering di sebut sebagai poraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum (Abidin (2004:31-34) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan yang operasional yang berada di bawah kebijakn pelaksanaan.

Younis (1990:3), membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni : formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner (1984:40), menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijaka, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat apliksai dan kelima evaluasi.

Starling (1973:13), menjelaskan ada lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni :

1. *Identification of neds*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain : menganalisis data, sampel, data statistic, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan bentuk-bentuk-bentuk peramalan.

2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemandirian teknologi dan analisa dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan penetapan warga, dan scenario pelaksanaannya, dan
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, system informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :

1. *Goal* atau tujuan yang di inginkan,
2. *plans* atau proposal, yaitu pengertian spesifik untuk mencapai tujuan,
3. *programs*, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu),
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan.

Butir-butir tersebut adalah :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan di pecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya menyelesaikan masalah.
5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaatidn berlaku mengingat terhadap warganya.

2.3 Pembentukan Peraturan Desa

Dasar pembentukan peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1092. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301.undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Tambahan Negara republik Indonesia nomor 4437 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 nomor 59, tambahan Negara republik Indonesia nomor 4844. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republikIndonesia

tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 52434). Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4737). Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4496). Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5105). Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 69 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa peraturan desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Di dalam peraturan desa yang berisi mengenai kewenangan serta penjabaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya memuat aspirasi dan partisipasi kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang terdapat dalam pasal 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tentang asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

2.4 Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan, sering bertentangan dengan yang di harapkan, bahkan menjadi produk kebijakan sebaagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakantanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat di pahami dari dua perspektif, yakni :

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupunpun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan sebagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin di wujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupaakn ikhwal berkaitan dengan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publoik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan di capai dapat di wujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara langsung berimbang dan menyeluruh aka membantu kita lebih mengerti dan maklum menggapai suatu kebijakan publik tersebut meski telah di rumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan.

Di sisi lain Tachjan (2006:63) mengemukakan bahwa :”implementasi kebijakan publik, disamping dapat di pahami sebagai salah satu efektivitas dari adminitrasi publik sebagai intitusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat di pahami pula sebagai salah satu lapangan studi adminitrasi publik sebagai ilmu.”

Pandangan tersebut, mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apun yang akan di implementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar yang prinsip dan substansinya bahwa setiap kebijakan sejak di rumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus membuat kita semakin proaktif dan mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik sebagai wujud kehandalan dalam prospektif administratif kebijakan itu sendiri.

Dunn (1981:56) memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *polici implementation is essentially a practical activity, as distinguished from polici formulation, which is essentially theoretical*, sehubungan sikap praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut di sebabkan karena ia terkait dengan tujuan diakannya kebijakan (*policy goals*) dan jika di lihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, di samping karakteristik lembaga dan rejim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dengan demikian, konteks implementasinya kebijakan tersebut di laksanakan. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dala

mencapai tujuan di tentukan dalam pelaksanaanny. Rumusan kebijakan yang telah di buat tidak aka mempunysi arti apa-apa kalau tidak di implementasikan. Oleh sebab itu, tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Sementara itu, Josy Adiwisastra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006:xii) menegaskan, bahwa : “ implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang di buat hanya akan menjadi ‘macam kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan”, selanjutnya, menutrut Josy adiwisastra dalam prolognya pada buku tachjan (2006:XIV) bahwa: “ keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rsaionalisme, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputsuan di antara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang lagislatif, keluarnya sebuah sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputsan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan jika sebuah kebijakan di ambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masi bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang di tetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat

mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu : “langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik.”

Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Sementara itu Abdul Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasa dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Ini berarti setelah keputusan itu di implementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain, tanpa sia-sia belaka, Karen itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri (Naihasy,2006). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan. Van Horn (Wahab,1997) mengartikan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam kebijakan.

Sedangkan Nakamura Dan Smallwood (1980-17) mengemukakan bahwa implementasi adalah “(1) a declaration of government preferences ; (2) mediated by reciprocal power dan (3) create a circular process characterized by reciprocal power relations and negotiations.” sementara itu Gunn dan Hoogwood (Sunggono, 1994:2) mengemukakan bahwa “implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial.” Sehubungan dengan itu Nugroho (2003:119) mengartikan “implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. “Hal ini sejalan dengan pandangan Salusi (2003:409) yang mengartikan “Implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.” Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005) membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan di pahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang di laksanakan.

Bertolak dari urutan di atas, maka implementasi di artikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah di tetapkan, tidak selalu di laksanakan dengan tertib dan rapi. Seandainya suatu rencana keputusan yang terdiri dari

seperangkat tujuan/sasaran, sarana, dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam implementasinya, banyak terjadi bahwa keputusan tersebut hampir selalu harus disesuaikan lagi. Misalnya, karena perumusan tujuan terlalu umum, sara tidak dapat di peroleh atau tidak dapat di pakai tepat pada waktunya. Atau Karen faktor waktu yang di pilih terlalu optimistic dan sebagainya, hal ini merupakan gambaran yang kurang tepat pada implementasinya keputusan.

Sebagaimana telah di uraikan di depan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di pilih dan di tetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui oeraturan perundang-undang, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat di pisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan katal lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan fakotr manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Sehubungan dengan Anderson (1978:92) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebikjakan ada empat aspek yang harus di perhatikan, yaitu :

1. siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. hakikat proses adminitrasi
3. kepatuhan atas suatu kebijakan , dan
4. efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melinbatkan secara terus menerus usaha-

usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan keputusan yang di inginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan (2002:18) menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi, yaitu : 1) penapsiran, 2) organisasi, 3) rapan.”

Sedangkan Abidin (2004:191) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu :

1. faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan , (b) faktor-faktor pendukung;
2. faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut Abidin menjelaskan bahwa implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralisasi atau dari atas ke bawah (apa yang dilaksanakan adalah apa yang telah di pselain itu juga putuskan). Selain itu juga Abidin mejelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu :

1. pendekatan structural
2. pendekatan procedural
3. pendekata kejiwaan, dam
4. pendekatan politk.

Sehubungan dengan itu maka, Nograho (2003:158), Naihasyi (2006:128) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publuk ada dua langkah yang di lakukan, yaitu :

1. langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program,

2. Melalui formulasi kebijakan *derivot* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi kebijakan, yaitu : 1) Peralatan kebijakan; 2) Kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi” (Abidin,2004:199).

Selanjutnya Abidin menjelaskan, bahwa peralatan kebijakan adalah cara yang di pakai dalam menerapkan kebijakan untuk menetapkan tujuan yang di tetapkan. Peralatan kebijakan ini berhubungan dengan sumber daya manusai, khususnya sumber daya apparatus, dan organisasi.Sumberdaya apparatus adalah subjek berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan.Sedangkan sebagai objek sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan suatu kebijakan.

“kewengan adalah kekuasaan tertentu yang di punyai dan dan secara formal di akui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia melaksanakan kebijakan” (Abidin, 2004:2003). Kewengan berkaitan dengan posisi yang berangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.Sehubungan dengan itu, maka perlu dilihat status dari kebijakan yang aka dilaksanakan.Apakah merupakan suatu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, suatu kebijakan operasioanal atau teknis.Implementasi kebijakan umum biasanya dilakukan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.Jadi pada masing-masing kebijakan terdapat pelaksanaan sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa *et al.*, 1994)..selanjutnya Wibawa *et al.*, (1994) menjelaskan secara keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa di mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah di perinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Sejalan dengan itu maka Nugroho, (2003:163) menjelaskan bahwa manajemen kegiatan implementasi kebijakan dapat di susun secara berurutan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) implementasi strategi (Pra implementasi), 2) Pengorganisasian, 3) Penggerakan dan kepemimpinan, 4) Pengendalian. Untuk jelasnya dapat di liat dari table berikut ini :

Table 2.1 manajemen Kegiatan implementasi kebijakan

No	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (pra Implementasi)	Mneyesuaikan Struktur dengan strategi Melembagakan strategi Mengoperasikan strategi
2.	Pengorganisasian	Deain organisasi dan struktur organisasi Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan Integrasi dan koordinasi Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia Hak, wewenang, dan kewajiban Penselegasian Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia Budaya organisasi
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan Motivasi Etika Mutu Kerja sama tim

		Komunikasi organisasi Negosiasi
4.	Pengendalian	Desain pengendalian System informasi manajemen Pengendalian anggaran/keuangan audit.

Uraian di atas menunjukkan bahwa inti dari pada implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang di buat di sesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, yang penting juga di perhatikan adalah perlunya pedoman yang dapat mengarahkan ruang gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Pedoman ini membantu pelaksana untuk menyesuaikan diri apabila ada hal-hal yang bersifat khusus yang di temukan ketika melakukan implementasi keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan sentralisasi atau dari atas ke bawah. sehubungan dengan itu, Abidin menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil di implementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi yang sering berubah dan sukar diprediksikan. hal ini sejalan dengan Selusu (2003:431) yang menyitir pandangan dari Alexander tentang masalah yang sering di jumpai dalam melaksanakan suatu strategi, yaitu :

1. Jangka waktu lebih lama dari yang di rencanakan koordinasi tidak berjalan secara efektif, pelaksana tidak memiliki keterampilan yang tidak memadai, faktor eksternalnya kurang terkontrol dan sering dilupakan.
2. Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai, sehingga pengarahan, intruksi kepada kariawan sering tidak tepat, pelatihan yang di syaratkan

jarang di lakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas eselon bawah sangat lemah.

Selain itu masalah lain yang sering muncul sehingga implementasinya sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasinya tidak mungkin dilakukan akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Kesenjangan menurut Warnham (dalam Salusu, 2003:4323) disebabkan oleh :

1. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan,
2. Kurangnya informasi,
3. Tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikan.

Selain itu kesenjangan tersebut boleh jadi disebabkan: "(1) karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, (2) karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan" (Abidin, 2004:207).

2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dari masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasinya, maka

pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini.

1) Model George C. Edwards III

Edwards III (1980:9), mengemukakan: *“in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?”* setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pernyataan abstraknya dimulai dari bagaimana pracondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsiv implementasi. Disisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. selain hal tersebut

keberhasilan implementasi kebijakan harus di dukung oleh struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

a) Faktor Komunikasi (*communication*)

Edwards III (1980;10) mengemukakan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasi kebijakan publik harus di sampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Jika mengimplementasi kebijakan yang di harapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang di tunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang di alami oleh para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukan dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate.

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat di nyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang di kehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus di nyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menasirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk

menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Dendandemikian intruksi implementasi inkonsisten dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan itu sendiri karena di pahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaftasinya.

b) Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya menurut Edwar (1980:10), Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang di perlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semua sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan sumberdaya yang itdak cukup akan berarti bahwa undang-undang akan dilakukan, pelayana tidak akan diberikan, dan peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena baagimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bia efektif.

c) Faktor Sikap Pelaksana (*Dispotition*)

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwar III (2980:11) menegaskan : sikap pelaksana merupakan

faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenal studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para [pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenal hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk manipulasi atau pekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksana atau bahkan membatasi otoritasnya.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika pelaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi tidak secara terbatas lebih membingungkan. Beberapa orang yang

mengimplementasikan kebijakan dalam beberapa hal independen dari banyak atasan mereka yang secara langsung berpartisipasi pada awal pemberian keputusan kebijakan. Karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, pelaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektifitas implementasi kebijakan.

d) Faktor struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III (1980;11) Menjelaskan : meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silan, dan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar yang dirancang, untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumberdaya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka

akan tetap diahambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, frag-mentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, meyebabkan yang di harapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan

Pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal.

2) Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Carel Van Horn (dalam Wibawa *et al.*, 1994;19) erumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variable yang mempengaruhi kerja suatu kebijakan.”

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono,2005:99) mengemukakan ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : 1) Standard dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) sikap para pelaksana.

Van meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan- perbedaan dalam proses implemenrasi akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan yang aka dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antar isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*).Kedua ahli menegaskan pula pendirinya pada konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka pemmasalahan yang perlu di kaji dalam hubungan ini ialah hambatanp-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubaahn dlam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme control setiap jenjang struktur (masalh ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling randah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi.(Hal ini menyangkut masalh kepatuhan).

Atas dasar pandangan seperti ini Van Meter dan Van Hom kemudain berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut : 1) jumlah masing-masing perubahan yang akan di hasilkan dan, 2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasinya.

Alasan di kemukakan hal ini ialah bahwa prose implementasi itu akan dipemgaruhi dimensi-dimensi kebijakan seperti itu, dalam artia bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, semetara kesepatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relative tinggi.

2.6 Definisi siswa

Pengertian siswa/murid/peserta didik.Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian murid berarti anak (orang sedang berguru/belajar, bersekolah). Sedangkan menurut sinolungan (dalam riska, dkk. 2013) peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.

Menurut Hamalik (2001) siswa atau murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa siswa adalah komponen terpenting di antara komponen lainnya. Siswa atau anak didik menurut Djamarah (2011) adalah subjek utama dalam pendidikan setiap saat. Sedangkan menurut Daradjat (dalam Djamarah, 2011) siswa atau anak pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama individu-individu yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan operasional teori tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Desa No.02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata dan Faktor-Faktor Apa Yang Mendorong Dan Penghambat Peraturan Desa No. 02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata.

Abidin (2014:191) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua proses, yaitu : 1) faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan , (b) faktor-faktor pendukung; 2) faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10) dalam buku Kadji Yulianto (2015). Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

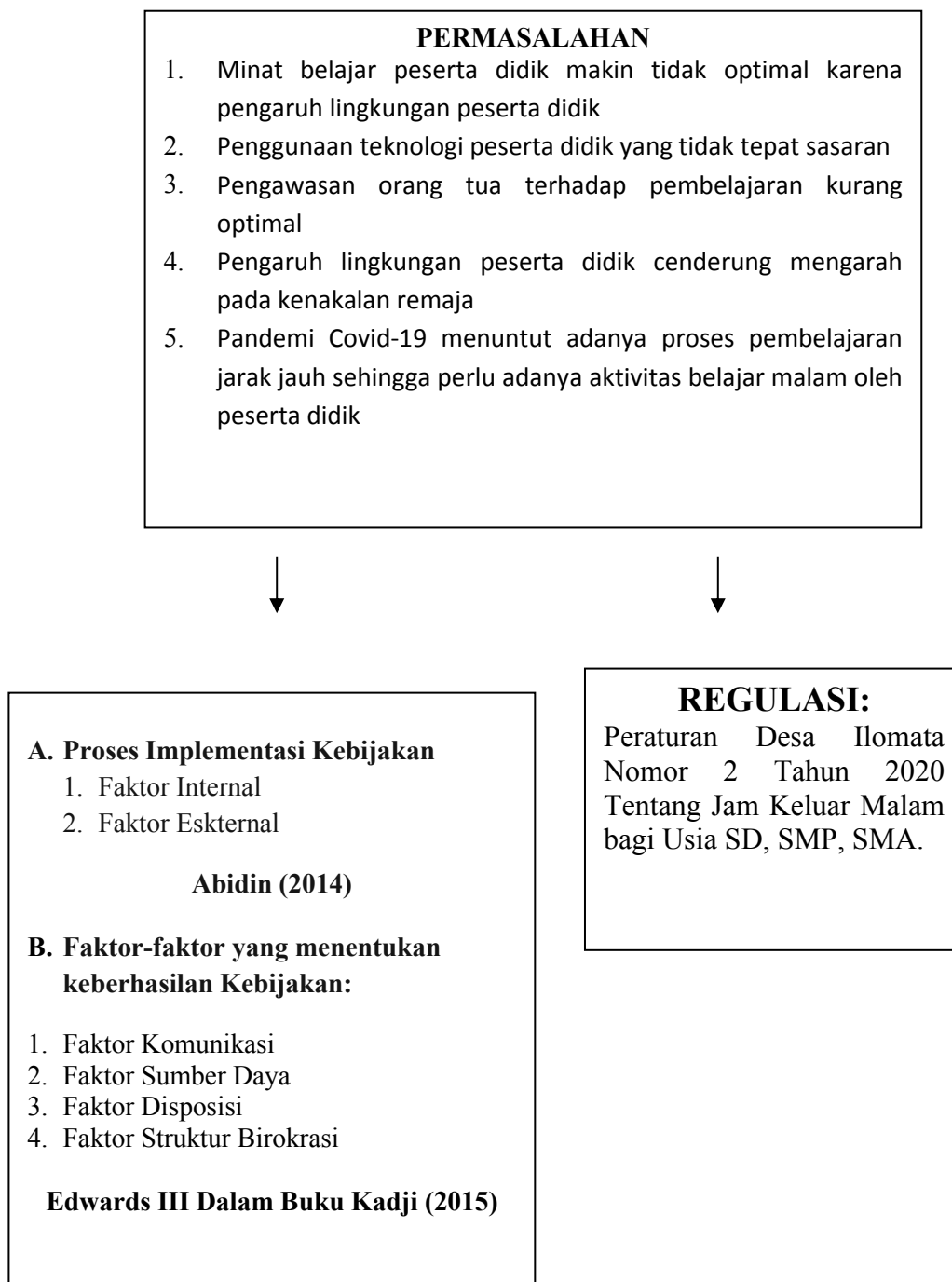
Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat Digambar dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan desa Jam wajib keluar pada malam hari bagi anak usia SD,SMP, dan SMA di di desa ilomata kecamatan atinggola.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus.

3.2.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dalam pencarian data sehingga terlebih dahulu ditentukan unit analisisnya. Manfaat dari fokus analisis ini adalah pertama, penetapan unit analisis dapat membatasi studi. Kedua, penetapan unit analisis itu berfungsi untuk memenuhi *criteria inklusi-ekslusi* atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun tujuan peneliti adalah melihat serta mendeskripsikan lebih mendalam bagaimana dampak implementasi Peraturan Desa Ilomata Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jam Keluar Malam bagi Usia SD, SMP, SMA.

3.2.4 Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data maka peneliti terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan implementasi Peraturan Desa Ilomata Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jam Keluar Malam bagi Usia SD, SMP, SMA.

Tabel. 3.1

Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Ilomata	1 orang
2.	SekretarisDesa	1 orang

3.	Kepala Dusun	4 orang
4.	Ketua BPD dan Anggota BPD	2 orang
5.	Orang Tua Murid Di Desa Ilomata	4 orang
6.	Jumlah	12 orang

Sumber: Data Primer: 2021

3.2.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari aparat Desa Ilomata Dan Masyarakat Umum penerima kebijakan. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan dalam hal ini aparat Desa Ilomata dan masyarakat umum yang merasakan dampak dari kebijakan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh melalui pihak pemerintah Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara serta masyarakat umum penerima kebijakan baik yang keberatan maupun yang mendukung kebijakan ini.

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di kantor Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.

3.2.7 Analisis Data

Sugiyono (2011: 91) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan

sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a) Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan informasi data yang diberikan; b) Mengecek kelengkapan instrument (daftar pertanyaan) sesuai dengan indikator kinerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang berikan oleh informan.

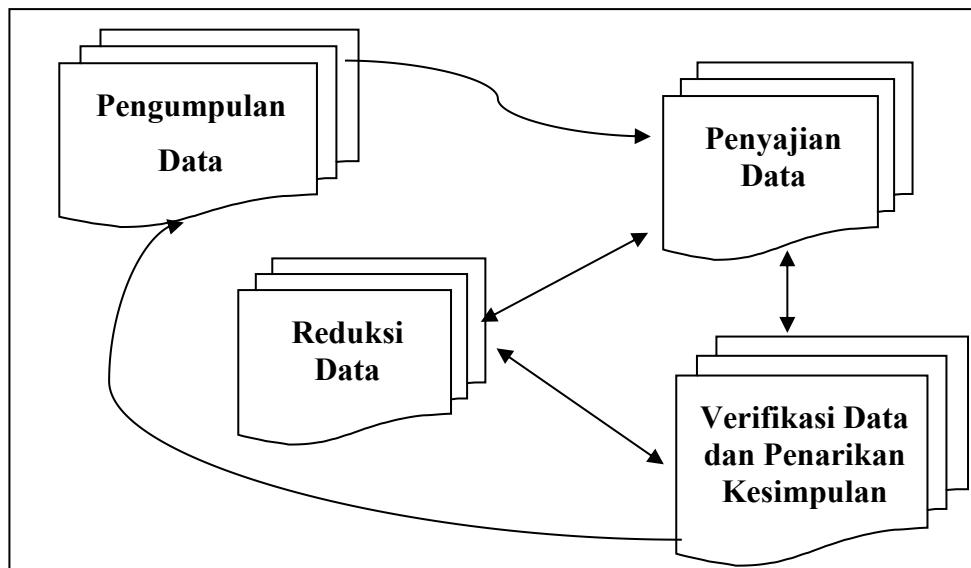
2. Penyajian Data

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diversifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Telah dikemukakan tiga hal utama yang merupakan komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini :



Gambar 3.1 : Analisis Model Interaktif (Miles & Huberman, 2007).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

1997 yang pada saat itu kepala desanya adalah “ahyar maloho” dengan adanya Desa Ilomata merupakan desa yang di mekarkan dari desa imana pada tahun semangat, perjuangan dan kerja keras dari tokoh masyarakat dan panitia pemekaran desa imana maka lahirlah desa mekaran pada tanggal 16 february 1996 yang di beri nama “DESA ILOMATA” (artinya: karya) yang kemudian pada saat itu yang di tunjuk sebagai pejabat kepala desa pertama adalah “Hamid Boeya” selama ± 1 tahun, kemudian pada tahun 1998 bapak Hamid Boeya menjadi kepala desa terpilih yang difinitif hingga tahun 2006.

Desa ilomata terletak di debagian selatan dari desa Imana (Desa induk) Kecamatan atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai luas wilayah ± 2.000 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Imana
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Bintana
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kec.Telaga Biru
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Iloheluma

Visi dan Misi

Visi dan Misi pembangunan desa Ilomata menyatu pada Visi dan Misi kabupaten Gorontalo Utara, Visi dan Misi pembangunan desa Ilomata sesuai masa jabatan kepala desa berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan 2025, yaitu :

Visi	:	Mewujudkan pemerintah desa ilomata yang Amanah, Santun, Kreatif, Transparan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kompak, dinamis, kreatif Mandiri, dan Berkpribadian.
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan masyarakat dalam rangka kapasitas kelembagaan menuju desa yang mandiri. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. 3. Melestarikan seni budaya yang ada pada masyarakat.

2.1.2 Sosial Budaya

Kondisi Sosial Budaya masyarakat Desa Ilomata dapat digambarkan sebagaimana berikut :

1. Demografi

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia, Dari Jumlah Penduduk yang berada pada kategori usia produktif Laki-Laki lebih sedikit dari Perempuan. Untuk lebih jelasnya data Penduduk Desa Ilomata per tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk (Jiwa) : 1.076

- b. Jumlah KK : 296
- c. Jumlah Laki-Laki
 - 0-15 Tahun : 346 Jiwa
 - 16-55 Tahun : 252 Jiwa
 - Diatas 55 Tahun : 28 Jiwa
- d. Jumlah Perempuan
 - 0-15 Tahun : 192 Jiwa
 - 16-55 Tahun : 229 Jiwa
 - Diatas 55 Tahun : 29 Jiwa

2. Kesejahteraan Sosial

Desa Ilomata Merupakan Salah Satu Desa Sesuai Data yang terlihat dibawah ini Kondisi Kesejahteraan Penduduknya secara umum masih tetap didominasi oleh sejumlah KK Prasejahtera bahkan KK Miskin.

- a. Jumlah KK Prasejahtera : 260 KK
- b. Jumlah KK Sejahtera : 24 KK
- c. Jumlah KK Kaya : 5 KK
- d. Jumlah KK Sedang : 7 KK

3. Mata Pencaharian

Dari sisi Mata Pencahariannya Penduduk Desa Ilomata didominasi oleh Petani, dan Wiraswasta serta Karyawan, hal ini disebabkan oleh posisi wilayah Desa Ilomata berada dipesisir hutan wilayah Gorontalo Utara, namun demikian ada pula beberapa Penduduk yang memilih menjadi petani meskipun lahannya

berada diwilayah kawasan hutan dan profesi lainnya seperti pada data dibawah ini :

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Pekerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Petani	140	200	200	222	188	268
2	Pelajar/Mahasiswa	69	170	167	167	69	170
3	Ib uRumah Tangga	203	227	230	230	203	227
4	Pedagang	36	45	45	45	36	45
5	Pegawai Swasta	10	23	25	25	10	23
6	Pensiun	-	-	-	-	-	-
7	Guru/Dosen	6	6	7	7	6	7
8	Industri	2	2	5	5	2	2
9	TNI/Polri	-	-	-	-	-	1
10	Dokter	-	-	-	-	-	-
11	Buruh Tani	160	130	150	150	160	130
12	Bidan	2	2	2	2	2	3
13	PNS	4	4	4	4	4	4
14	Belum Bekerja	367	190	176	176	367	190
15	Lainnya	5	6	10	10	5	6
	Total	1.004	1.005	1.021	1.037	1.052	1.076

4. Agama

Seluruh Warga Desa Ilomata mayoritas Muslim (Islam) seperti ditunjukkan data dibawah ini :

- a. Islam : 1.076 Orang
- b. Kristen : -
- c. Hindu : -

5. Budaya

Kebudayaan asli seperti Turunani, Buruda Dewasa ini sudah tidak terlalu dikenal lagi disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dengan masuknya budaya Barat seperti Band, Orgen, dan Karaoke, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan Masyarakat untuk menggali dan melestarikan kembali Budaya dimaksud, termasuk Dana-Dana Tradisional, Dikili (Zkir) dan Kelompok Zamrah (Dana-Dana Tradisional) serta Mi'raj (Perayaan Isra' Mi'raj). Khusus untuk Adat Upacara Pernikahan dan Upacara Penguburan masih tetap terpelihara dengan baik.

6. Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat dari Tahun ke Tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tingkatan Pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan terakhir :

- 1. Tidak Tamat SD : 98 Orang
- 2. SD : 98 Orang
- 3. SLTP : 60 Orang
- 4. SLTA : 45 Orang
- 5. S-1 : 15 Orang

6. S-2 : -

7. S-3 : -

Desa Ilomata dalam Penyelenggaraan Pendidikan setiap Tahun mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah Penduduk buta huruf, sedangkan sarana Pendidikan Formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik Pemerintah Desa beserta warga Masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana Pendidikan berupa Rehabilitas sarana Pendidikan.

Berikut ini adalah Data Penunjang sarana Pendidikan berikut Peserta didik yang ada di Desa Ilomata;

1. Paud	Jumlah Gedung	: 2 Buah
	Jumlah Guru	: 4 Orang
	Jumlah Murid	: 52 Orang
2. Taman Kanak-Kanak	Jumlah Gedung	: 1 Buah
	Jumlah Guru	: 2 Orang
	Jumlah Murid	: 28 Orang
3. SD/MI	Jumlah Gedung	: 2 Buah
	Jumlah Guru	: 25 Orang
	Jumlah Murid	: 170 Orang
4. SLTP	Jumlah Gedung	: 1 Buah
	Jumlah Guru	: 13 Orang
	Jumlah Siswa	: 96 Orang

Desa Ilomata juga memiliki potensi kekayaan alam yang tidak jauh berbeda dari desa-desa lainnya. Penduduknya 92,84 % bekerja sebagai petani yang mengelola kekayaan alam yang ada. Disana bahkan terdapat penduduk yang menambah penghasilan bertaniya dengan mengelola nira menjadi gula aren, ubi hutan, minyak kelapa alami, penjahitan, dan sektor UMKM lainnya. Namun semuanya belum terorganisir dengan baik, bahkan dari tahun ketahun tidak ada perkembangan usahanya. Hal ini kemungkinan terbesar dipengaruhi oleh *Self Efficacy* yang meliputi tingkat Pendidikan masyarakatnya, kondisi lingkungan masyarakat, kualitas angkatan kerja. Data menunjukkan dari jumlah 470 angkatan kerja, terdapat 98 orang yang hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar. (Sumber Data: Pemerintah Desa Ilomata Tahun 2019)

Untuk itu Pemerintah Desa Ilomata menggagas kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi Siswa SD, SMP, SMA. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat memiliki waktu lebih banyak untuk belajar menambah wawasan serta keterampilan dirinya guna dapat bersaing menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing dimasa yang akan datang. Desa Ilomata yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang besar diharapkan dapat ditunjang oleh tingkat Pendidikan yang mempuni bagi masyarakatnya agar dapat menciptakan inovasi yang dapat memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam mereka.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan di antara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-

undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan jika sebuah kebijakan di ambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masi bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang di tetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Abidin (2014:191) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua proses, yaitu : 1) faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan , (b) faktor-faktor pendukung; 2) faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Edwards III (1980) dalam buku Kadji Yulianto (2015:23) , mengemukakan: *“in our apporuch to the study of policy implementasion, we bwgin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are primary abstacles to succsesfull policy implementation?”* setidaknya George C. Edwads III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pernyataan abtraknya dimulai dari bagaimana pracondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III (1980;10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Peneliti selanjutnya menerangkannya lebih mendalam berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, sebagai berikut:

4.2.1 Faktor Internal

Faktor internal dalam implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Terkait dengan faktor internal terhadap kebijakan peraturan desa ilomata tentang pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA, Kepala Desa Ilomata mengatakan bahwa:

“... Pada hakekatnya kebijakan ini melalui proses yang cukup Panjang. Proses itu bermula dari permasalahan warga saya terkait Pendidikan. Anak-anak itu masih banyak yang berkeliaran dijam malam. Sehingga setelah kita rundingkan maka akhirnya Perdes ini ditetapkan. (Wawancara 12 November 2021).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*publik policy proses*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Terkait dengan faktor internal pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA, Ketua BPD Desa Ilomata menambahkan bahwa:

“... Semuanya sudah berproses dan intinya memang kebijakan ini sudah dibahas bersama dan perlu untuk diterapkan. (Wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan tanggapan dari para informan diatas Menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan- tuntutan dari rakyat”.

Sedangkan menurut Wahab (2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan tanggapan dari para ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

4.2.2 Faktor Eksternal

Kebijakan publik ditingkat desa idealnya merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. Seluruh kajian tersebut penting melibatkan eksternal untuk sama-sama mendukung program Pembatasan Jam Malam Bagi Siswa di Desa Ilomata.

Terkait dengan hal tersebut Peran Babinsa Dan Babinkamtibmas diperlukan. Salah seorang masyarakat di Desa Ilomata berpandangan bahwa:

“... Ia di libatkan, Peran Babinsa Dan Babinkamtibmas mereka selalu membina dan bertanya tentang kemaman desa kami. Lewat pertemuan ataupun musyawarah. Saya pikir masyarakat ada yang taat walaupun masih terlihat ada juga yang melanggar. (Wawancara dengan masyarakat/18 November 2021).

Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat lain yang berpendapat bahwa:

“... Harapan kami agar anak-anak kami waktunya teratur dan di jauhkan dari hal-hal yang merusak masa depan anak kami. (Wawancara dengan masyarakat/18 November 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Oleh karena itu penerapan pembatasan jam malam bagi siswa di Desa Ilomata penting untuk dijalankan dan diharapkan bisa di adopsi oleh desa-desa lain dan juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

4.2.3 Faktor Komunikasi

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ilomata terkait dengan apa yang menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan peraturan desa ilomata tentang pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA, mengatakan bahwa:

"... Mengantisipasi kenakalan remaja di jaman sekarang untuk tidak melakukan atau terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan oleh orang tua , termasuk ke hal-hal negative dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga dengan peraturan ini pemerintah dan masyarakat akan terbantuan dengan regulasi yang ada di desa. (Wawancara 12 November 2021).

Jika mengimplementasi kebijakan yang di harapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang di tunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang di alami oleh para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukan dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate.

Selanjutnya ketika peneliti bertanya kepada Kepala Desa Ilomata terkait bagaimana bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa ilomata kepada seluruh sekolah dan orang tua murid, Kepala Desa berpendapat bahwa:

“... Melakukan rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait, baik di kalangan lembaga desa, tokoh agama, tokoh pendidik dan lebih khusus kepada orang tua. (Wawancara 12 November 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatakan bahwa:

“... Komunikasi dan Sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa sangat baik karena sosialisasi ini di lakukan dalam bentuk musyawarah bersama guru-guru dan orang tua murid guna menjamin agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. (Wawancara 19 November 2021)

Kadji Yulianto (2015) menerangkan bahwa faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat di nyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang di kehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus di nyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Selanjutnya Dwiyanto (2014) menambahkan bahwa komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Dengan demikian intruksi implementasi inkonsisten dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan itu sendiri karena di pahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaftasinya.

Berdasarkan tanggapan dari informan diatas dan dilengkapi dengan kajian para ahli, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA dilakukan untuk Mengantisipasi kenakalan remaja di jaman sekarang untuk tidak melakukan atau terjerumus ke

hal-hal yang tidak di inginkan oleh orang tua , termasuk ke hal-hal negative dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga dengan peraturan ini pemerintah dan masyarakat akan terbantuan dengan regulasi yang ada di desa. akan tetapi kebijakan ini cenderung belum diketahui oleh masyarakat Desa Ilomata secara luas karena faktor komunikasi yang kurang intens terbangun antara pemerintah desa dengan para orang tua murid. Padahal proses sosialisasi yang merupakan proses komunikasi kebijakan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa dan perangkat desa tentang adanya kebijakan yang berkaitan dengan sumber pendanaan baru bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Kegiatan tersebut dilakukan dalam musyawarah desa yang menjadi forum komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah desa biasanya dilakukan terkait adanya program baru yang mendesak untuk diputuskan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih informasi yang diterima oleh masyarakat desa terkait pengaturan jam keluar malam bagi siswa. jika tidak dilakukan hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu masyarakat juga masih belum memahami secara menyeluruh tentang dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Ilomata.

4.2.4 Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Terkait dengan bagaimana kesiapan aparat desa dalam mengawasi pelaksanaan pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA, Kepala Desa Ilomata menerangkan bahwa:

“... Semua telah di jadwalkan berdasarkan wilayah ataupun masing-masing dusun kerjasama dengan masyarakat di dusun itu. SOP penerapannya sudah dibahas dari awal oleh seluruh perangkat desa termasuk babinsa dan babinkamtimas dan perwakilan masyarakat. (Wawancara 12 November 2021).

Implementasi kebijakan juga bertujuan agar kebijakan yang di buat di sesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, yang penting juga di perhatikan adalah perlunya pedoman yang dapat mengarahkan ruang gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom. Terkait dengan bagaimana bentuk pelaksanaan pembatasan jam malam oleh babinkamtimas dan babinsa desa serta Kepolisian Sektor dilibatkan dalam pengawasan ini, Kepala Desa menambahkan bahwa:

“... Di libatkan babinkamtimas dan babinsa apabila terjadi kekacauan dalam pelaksanaan aturan tersebut. selagi dalam pelaksanaannya masih tergolong aman maka kami mempercayakan itu kepada masing-masing warga. (Wawancara 12 November 2021).

Terkait dengan keterlibatan unsur pengamanan di Desa Ilomata, Kepala Dusun Sentral menambahkan bahwa:

“... Ia terlibat. Mereka (babinsa dan babinkamtibmas) selalu memberikan pembinaan dan meminta laporan terkait tentang keamanan di desa ilomata

terutama terkait dengan pelaksanaan aturan tersebut. (Wawancara 18 November 2021)

Tanggapan senada juga diutarakan oleh Kepala Dusun Pakuku, yang menanggapi bahwa:

“... Peran Badinkamtibmas Dan Babinsa Ya terlibat. Mereka meminta laporan terkait dengan aturan tersebut. (Wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan tanggapan dari para informan diatas, hal ini sejalan dengan pendapat Selusu (2003:431) yang menyetir pandangan dari Alexander tentang masalah yang sering di jumpai dalam melaksanakan suatu strategi sumber daya, yaitu: 1) Jangka waktu lebih lama dari yang di rencanakan koordinasi tidak berjalan secara efektif, pelaksana tidak memiliki keterampilan yang tidak memadai, faktor eksternalnya kurang terkontrol dan sering dilupakan; 2) Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai, sehingga pengarahan, intruksi kepada kariawan sering tidak tepat, pelatihan yang di syaratkan jarang di lakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas eselon bawah sangat lemah.

Kualitas pimpinan dalam hal ini Kepala Desa dan jajaran penting untuk dilaksanakan sehingga implementasinya tidak mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasinya tidak mungkin dilakukan akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang di rumuskan dengan apa yang dilaksanakan dan tidak memicu kesenjangan.

Kesenjangan menurut Warnham (dalam Salusu, 2003-4323) di sebabkan oleh : 1) Tidak tersedia sumber daya pada saat di butuhkan; 2) Kurangnya informasi; 3) Tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan

sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya. Selain itu kesenjangan tersebut boleh jadi disebabkan:(1) karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, 2) karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan” (Abidin,2004-207).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan dukungan teori dari para ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa Dalam implementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang direncanakan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan program pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA di Desa Ilomata tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga pada sumber daya lainnya misalnya financial, fisik, material, mesin dan kemampuan teknologi dan lain-lainnya. diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan penentu keberhasilan sebuah program. Pemerintahan di Desa Ilomata dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.Hal ini dinilai penting dalam kerangka tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien.

4.2.5 Faktor Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenal studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Terkait dengan bagaimana reaksi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten dalam menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Desa Ilomata mengatakan bahwa:

“... Jajaran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Gorontalo Utara mendukung sepenuhnya program ini. Disamping itu Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa merupakan otonomi khusus maka segala bentuk program pemerintah desa seharusnya diikuti oleh seluruh perangkat dalam pemerintahan sepanjang itu tidak melanggar norma-norma sosial. (Wawancara 14 November 2021).

Salah satu alasan mengenal kebijakan pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Terkait dengan apa harapan pemerintah desa mengenai pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA, Kepala Desa Ilomata mengatakan bahwa:

“... harapan pemerintah dengan di terbitkannya peraturan desa tersebut dapat mengurangi dan membantu sertai mengurai para remaja anak-anak (anak

sekolah) yang berkumpul setiap malam yang dapat memicu persoalan baru di kalangan remaja saat ini. (wawancara 12 november 2021).

Selanjutnya harapan pemerintah Desa Ilomata terkait dengan program ini, Kepala Dusun Harapan menambahkan bahwa:

“... Harapan kami semoga remamuda (anak sekolah) tidak terjerumus pada pergaulan bebas,sehingga kedepannya menjadi generasi penerus yang baik. (Wawancara 12 November 2021).

Kepala Dusun Sentral berhadap dengan adanya aturan ini dapat senantiasa saling mengawasi antara pemerintah desa, aparat keamanan dan orang tua murid.Ia juga menambahkan bahwa:

“... Semoga dengan aturan ini bisa dapat menciptakan generasi yang terhindar dari hal-hal yang merusak masa depan anak-anak sekolah. . (Wawancara 18 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, Nugroho (2014:22) berpendapat bahwa sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sikap merupakan kumpulan dari berbagai pemikiran, keyakinan dan pengetahuan. Sikap pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan memiliki komitmen terhadap dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan hasil keputusan bersama .

Selanjutnya Merilee S Grindle dalam Nugroho (2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation) ide dasarnya adalah bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh derajat implementability

dari isi kebijakan tersebut antara lain terkait dengan sikap dari pelaksana kebijakan.

Dalam konteks Pendidikan Hamalik (2011) menerangkan bahwa siswa atau murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa siswa adalah komponen terpenting di antara komponen lainnya. Siswa atau anak didik adalah subjek utama dalam pendidikan setiap saat. Siswa atau anak pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama individu-individu yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan didukung oleh beberapa tanggapan para ahli di atas, peneliti berkesimpulan bahwa disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal.

4.2.6 Faktor Struktur Birokrasi

Faktor implementasi kebijakan Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang orang tua murid terkait bagaimana reaksi dan pertanggungjawaban orang tua murid dan guru terhadap kebijakan ini, mengatakan bahwa:

“... Sangat mendukung dan menyetujui kebijakan tersebut. Sebab dengan adanya peraturan tersebut para orang tua dan guru merasa terbantuan. Disamping itu hal ini dapat membuat anak saya jadi lebih banyak waktu belajar dirumah. (Wawancara 20 November 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatakan bahwa:

“... Sangat baik, karena selain orang dan guru-guru melindungi anak-anak sekolah, peraturan desa ini di terbitkan oleh pemerintah desa guna membantu harapan guru-guru dan orang tua murid (Wawancara 19 November 2021).

Kepala Dusun Harapan menambahkan terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA di Desa Ilomata, dan mengatakan bahwa:

“... Ada beberapa faktor yang mempengaruhi: pertama, faktor kesibukan pemerintahan apabila pekerjaan menumpuk dan kesibukan rumah tangga, dan kedua yakni factor kesehatan. (Wawancara 12 November 2021).

Selain itu, terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA di Desa Ilomata Kepala Dusun Botu Ali juga menambahkan bahwa:

“... Yang paling Nampak itu Faktor alam, apabila hujan kami tidak bias menjalankan razia. Faktor kesibukaan. Apabila ada kesibukan kami yang mendesak kami tidak dapat melaksanakan Razia. (Wawancara 18 November 2021).

Lain halnya dengan tanggapan dari Anggota BPD Desa Ilomata, terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA di Desa Ilomata Kepala Dusun Botu Ali juga menambahkan bahwa:

“... Factor yang menghambat jalan aturan ini , terlalu banyak pekerjaan dan kesibukan yang di laksanakan oleh pemerintah desa sehingga aturan ini belum berjalan dengan semaksimal mungkin. (Wawancara 19 November 2021)

Sikap praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan adminitrasi. Hal tersebut di sebabkan karena ia terkait dengan tujuan diakannya kebijakan (*policy goals*) dan jika di lihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, di samping karakteristik lembaga dan rejim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ilomata terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, DAN SMA di Desa Ilomata, mengatakan bahwa:

“... Selama aturan ini berlangsung ada beberapa factor yang kami rasakan yg dapat menghambat jalannya aturan ini diantaranya tingkat pemahaman masyarakat masi kurang terkait dengan adanya aturan ini, kemudian faktor alam, ataupun hujan sehingga kami tidak menjalankan Rajia pada malam hari, dan jangkauan wilayah yang sangat berjauhan. (Wawancara 12 November 2021).

Kadji Yulianto (2015) menerangkan bahwa struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dalam ruang lingkup birokrasi pelaksanaan

kebijakan. Kecenderungan desain organisasi bersifat hirarki dapat menciptakan hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. Salah satu aspek yang cukup penting dari struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan program kebijakan. Struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan dukungan teori dari para ahli di atas, peneliti berkesimpulan bahwa Struktur birokrasi yang tersedia di Kantor Desa Ilmota telah memiliki bagian yang telah spesifik mengelola suatu urusan termasuk mengatur dan membina keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Selain itu kemampuan tiap pegawainya pun sudah cukup memadai walaupun dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak menjadi penghambat dalam implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan bentuk komunikasi tersebut dilakukan dengan cara rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait yaitu Lembaga Desa, tokoh Agama, Tokoh Pendidik dan kepada orang tua murid
2. Sumber daya dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Ilomata menggunakan seluruh mitra Desa seperti Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepolisian Sektor untuk membantu mengawasi jalannya kebijakan.
3. Disposisi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan sangat efektif. Hal ini dikarenakan setelah diterbitkannya kebijakan mampu membantu serta mengurai para remaja berkumpul setiap malam yang memicu persoalan baru dikalangan remaja saat ini.
4. Struktur birokrasi dalam kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa menunjukkan belum cukup optimal karena pemerintah Desa Ilomata

masih diperhadapkan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang paham dengan maksud dan tujuan dari kebijakan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Desa Ilomata dapat memaksimalkan kebijakan ini agar dapat menumbuhkan sikap disiplin bagi masyarakat dan terutama siswa.
2. Diharapkan agar pemerintah Desa dapat menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebijakan pembatasan jam keluar malam bagi siswa, dan memaksimalkan potensi pengawasan perangkat Desa dalam menerapkan kebijakan ini.
3. Diharapkan agar pemerintah Kecamatan Dan Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa mendukung kebijakan ini untuk memaksimalkan potensi peserta didik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 2007. *Analisis data kualitatif* Terj. Tjejep.Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Nurhaeni, I. D. A. (2009). *Kebijakan publik pro gender*. Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan. Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai. Graha Ilmu*: Yogyakarta
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan Desa Ilomata Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia SD, SMP, SMA Di Desa Ilomata*

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02 TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA SD,SMP,SMA DI DESA ILOMATA

I. BIODATA PENGISI

1. No. Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian :
4. Pendidikan Terakhir : SMA. Diploma. S1. S2.

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat

Wawancara ditujukan kepada aparat desa ilomata, guru dilingkungan sekolah SD, SMP, SMA di Desa Ilomata, dan Orang Tua Murid

PERTANYAAN!

FAKTOR KOMUNIKASI

1. Apa yang menjadi alasan utama pemerintah Desa mengeluarkan peraturan desa ilomata tentang pembatasan jam keluar malam bagi anak sekolah SD, SMP, SMA?
2. Bagaimana bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa ilomata kepada seluruh sekolah dan orang tua murid di Desa ilomata?

FAKTOR SUMBER DAYA

3. Bagaimana kesiapan aparat desa dalam mengawasi pelaksanaan pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA?
4. Apakah babinkamtipmas dan babinsa desa serta Kepolisian Sektor dilibatkan dalam pengawasan ini? Bagaimana bentuknya?

FAKTOR DISPOSISI

5. Bagaimana reaksi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten dalam menanggapi kebijakan ini?

6. Apa harapan pemerintah desa mengenai pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA?

FAKTOR STRUKTUR BIROKASI

7. Bagaimana reaksi dan pertanggungjawaban orang tua murid dan guru terhadap kebijakan ini?
8. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pembatasan jam malam bagi anak sekolah SD, SMP, Dan SMA di Desa Ilomata?

POTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Desa Ilomata (Marwan H.Boeya S.Pd)



(Wawancara 12 November 2021).

Gambar 2. Wawancara Bersama Sekretaris Desa Ilomata (Nelvin Tololiu)



(Wawancara 14 November 2021).

Gambar 3. Wawancara Bersama Kepala Dusun Sentral (Ahmad Pakaya)



. (Wawancara 18 November 2021)

Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Dusun Harapan (Surahmad Jahidi ST)



(Wawancara 12 November 2021).

Gambar 5. Wawancara Bersama Kepala Dusun Pakuku (Imran Supu)



(Wawancara 19 November 2021).

Gambar 6. Wawancara Bersama Kepala Dusun Botu Ali (Anton Napu)



(Wawancara 18 November 2021).

Gambar 7. Wawancara bersama Ketua BPD Desa Ilomata (Ropal Palia)



(Wawancara 19 November 2021).

Gambar 8. Wawancara Bersama Anggota BPD Desa Ilomata (Jepri Salama)



(Wawancara 19 November 2021).

Gambar 9. Wawancara Bersama masyarakat dusun sentral (Hendrik Abas)



(Wawancara dengan masyarakat/18 November 2021).

Gambar 10. Wawancara Bersama Masyarakat Dusun Harapan (Irpan Kuki)



(Wawancara 18 November 2021).

Gambar 11. Wawancara Bersama Masyarakat Dusun Pakuku (Awin Supu)



(Wawancara 20 November 2021).

Gambar 12. Wawancara Bersama masyarakat dusun botu ali (Aden dunggio S.THI)



(Wawancara 20 November 2021).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3522/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Ilomata Kecamatan Atinggola

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mizan Tololiu
NIM : S2117118
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Desa Ilomata Kecamatan Atinggola
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02 TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA SD, SMP, SMA DI DESA ILOMATA KECAMATAN ATINGGOLA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 12 Agustus 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ATINGGOLA
DESA ILOMATA

Alamat : Jln No 1 Siswa Desa Ilomata Kecamatan Atinggola KP.96253

Email : ilomata01.2011@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/SK/DIL-Atg/43^o/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan kepada :

Nama : MIZAN TOLOLIU
Nim : S2117118
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Dusun Sentral Desa Ilomata Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.

Bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02 TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA MALAM HARI BAGI USIA SD,SMP,SMA DI DESA ILOMATA KECAMATAN ATINGGOLA"** pada bulan agustus sampai dengan oktober 2021 di kantor desa ilomata kecamatan atinggola.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ilomata, 29 Oktober 2021

Kepala Desa Ilomata


MARWAN H. BOEYA S.Pd



PAPER NAME

SKRIPSI_S2117118_MIZAN TOLOLIU_IM
PLEMENTASI PERATURAN DESA NO.02
TENTANG JAM WAJIB KELUAR PADA M
ALAM

AUTHOR

S2117118 MIZAN TOLOLIU

WORD COUNT

11445 Words

CHARACTER COUNT

72997 Characters

PAGE COUNT

68 Pages

FILE SIZE

282.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 7, 2022 11:37 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 7, 2022 11:40 AM GMT+8

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 099/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MIZAN TOLOLIU
NIM : S2117118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa No.02 Tentang Jam Wajib Keluar Pada Malam Hari Bagi Usia Sd,Smp,Sma Di Desa Ilomata

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 25 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

BIODATA MAHASISWA



I. Identitas

Nama : Mizan Tololiu
Nim : S2117118
Tempat, Tanggal Lahir : 16, februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implemntasi peraturan desa no.02 tentang jam wajib keluar pada malam hari bagi usia SD,SMP,SMA di desa ilomata kecamatan atinggola.
Alamat : Desa Ilomata kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara.
Alamat e-mail : mhizan.007@gmail.com
No. HP : 085342139461

II. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar di SDN 1 Ilomata, KEcamatan atinggola Kabupaten gorontao utaralulus tahun 2008
- b. Sekolah Menengah Pertama di SMP Smp Negeri 4 Satap Atinggola Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Lulus Tahun 2011.
- c. Sekolah Menengah Atas di Negeri 1 Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Lulus Tahun 2014.